

# Analisis Kritis-Transformatif Data Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Dimas Rahman Rizqian  
Universitas Jenderal Soedirman  
[dimas.rizqian@mhs.unsoed.ac.id](mailto:dimas.rizqian@mhs.unsoed.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 10-04-2022

Disetujui: 25-06-2022

### Kata Kunci:

Pembangunan  
Manusia, Gender,  
Pemalang

### Keywords:

Human Development,  
Gender, Pemalang

## ABSTRAK

**Abstrak:** Analisis kritis-transformatif terhadap pembangunan manusia berbasis gender dan eksplorasi potensi di Kabupaten/Kota merupakan suatu hal yang amat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan manusia berbasis gender dan mengeksplorasi potensi yang dapat memajukan pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, IPM Kabupaten Pemalang tidak memiliki peningkatan yang signifikan, yang mana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.29 bagi yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.96 bagi yang berjenis kelamin perempuan. Kedua, IPG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 86.49 berada dibawah IPG Jawa Tengah yakni 92.48 dan Nasional yaitu 91.06. ketiga, IDG Kabupaten Pemalang yaitu 81.27 yang mana data tersebut lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 71.64 dan Nasional yakni 75.57. Akan tetapi data tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Data IDG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 81.27 dan pada tahun 2020 yaitu 80.95. keempat, posisi Kabupaten Pemalang berada dalam Kuadran III (IPM dan IPG dibawah Regional) bersama dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Kelima, posisi Kabupaten Pemalang berada pada Kuadran IV (IPG dibawah Regional dan IDG diatas Regional) bersama dengan Kabupaten Tegal. Dan terakhir, potensi dan strategi dalam upaya meningkatkan IPM, IPG, dan IDG yaitu mengoptimalkan modalitas kesadaran kolektif dan Taman Bacaan Masyarakat.

**Abstract:** Critical-transformative analysis of gender-based human development and exploration of potential in districts/cities is very important. This research aims to analyze gender-based human development and explore the potential that can advance gender-based human development in Pemalang Regency. The research method used is quantitative secondary data analysis. The results showed that: First, the IPM of Pemalang Regency did not have a significant increase, where in 2020 the IPM of Pemalang Regency was 71.41 for those of the male sex and 61.29 for those of the female sex, while in 2021 the IPM of Pemalang Regency was 71.41 for those of the male sex and 61.96 for those of the female sex. Second, the IPG of Pemalang Regency in 2021, which is 86.49, is below the IPG of Central Java, which is 92.48 and the National, which is 91.06. Third, the IDG of Pemalang Regency is 81.27, which is higher than the Central Java Province, which is 71.64 and the National, which is 75.57. However, the data did not show a significant increase compared to the previous year. Fourth, Pemalang Regency's position is in Quadrant III (IPM and IPG below Regional) along with Brebes Regency, Cilacap Regency, Wonogiri Regency, Grobogan Regency, Blora Regency, Rembang Regency, Pati Regency, Batang Regency, Tegal Regency, Magelang Regency, Jepara Regency and Demak Regency. Fifth, Pemalang Regency's position is in Quadrant IV (IPG below Regional and IDG above Regional) together with Tegal Regency. And finally, the potential and strategies in an effort to improve IPM, IPG, and IDG are optimizing the modalities of collective awareness and Community Reading Gardens.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia berbasis gender sangat penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini penting untuk kesejahteraan dan pemberdayaan individu secara keseluruhan, terutama perempuan, dan memiliki manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, partisipasi politik, dan hak asasi manusia (Prabhu & Iyer, 2019; Pusposari, 2020). Mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, norma masyarakat dan sikap budaya, interseksionalitas, resistensi kelembagaan, pertahanan budaya, pemilahan dan pengukuran data, konteks sejarah dan sosial (Wu, 2021).

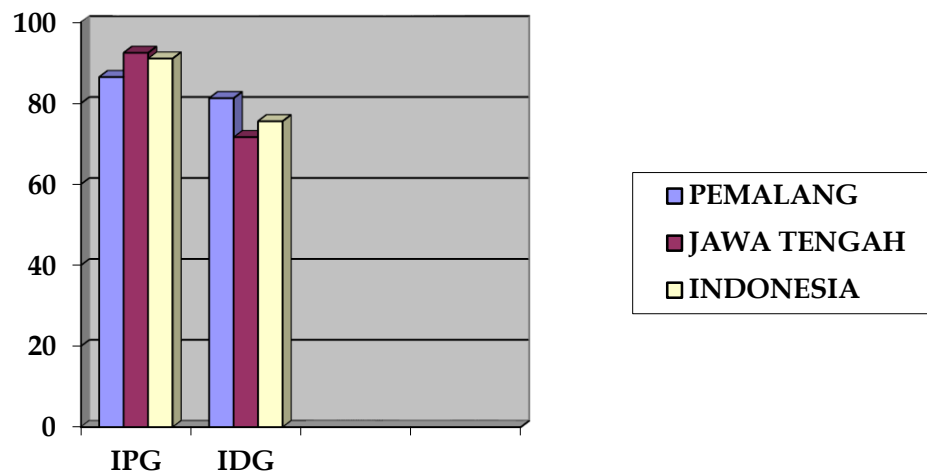
Keadilan gender mengacu pada redistribusi kekuasaan, peluang, dan akses secara sistemik bagi orang-orang dari semua jenis kelamin. Hal ini melibatkan pendekatan holistik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan menangani berbagai sumber penindasan yang tumpang tindih yang dihadapi perempuan dan individu non-biner. Hal ini tidak hanya mencakup diskriminasi berbasis gender, tetapi juga diskriminasi berdasarkan ras, kelas, etnis, usia, dan fundamentalisme lainnya (Chen, 2021). Isu-isu keadilan gender memiliki banyak sisi dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sejarah, budaya, dan ekonomi di mana isu-isu tersebut terjadi. Mengatasi masalah-masalah ini melibatkan kombinasi norma-norma internasional, keterlibatan lokal, dan pendekatan transformatif yang mengakui adanya interaksi yang kompleks antara kekuatan struktural, agen, dan sosiokultural yang membentuk hubungan gender (White, 2011; Hein et al., 2016; Alvarez & Lovera, 2016; Weldon & Htun, 2019). Dalam konteks krisis iklim misalnya, pembangunan gender juga sangat penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap jenis kelamin yang berbeda (Dankelman & Naidu, 2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan tegas mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra yang seimbang dan setara dalam pembangunan (KemenPPA RI, 2021, hlm. III). Hal tersebut sesuai dengan amanat dan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari pernyataan Menteri PPA RI diatas, memberikan penegasan atas pentingnya pembangunan berbasis gender yang seimbang dan setara di Indonesia. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan salah satu tolak ukur dari tingkat keberhasilan pembangunan adalah pembangunan manusia yang dimilikinya (KemenPPA RI, 2021, hlm. 34).

Pembangunan yang berbasis gender memiliki arti sebagai proses transformasi kehidupan manusia tanpa adanya perbedaan, diskriminasi dan kekerasan, dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat menuju ke arah yang lebih baik

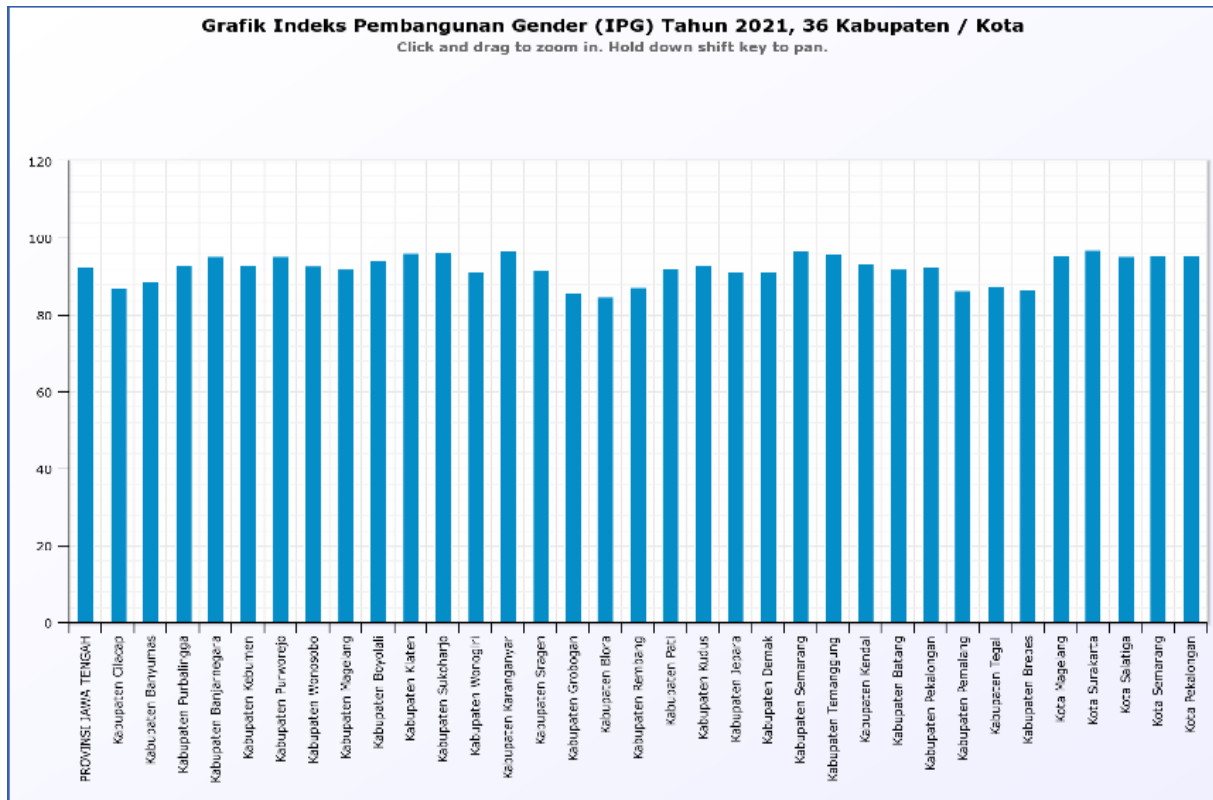
(Pauzia, 2021, p. 234). Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan bangsa merupakan strategi yang berupaya demi meningkatkan kepedulian akan aspirasi kepentingan dan peranan semua warga masyarakat tidak terkecuali perempuan (Purwaningsih, 2021, p. 24). Maka, pemahaman bahwa pembangunan manusia hanya tugas laki-laki adalah sesuatu yang amat keliru. Di sinilah pembangunan manusia berbasis gender merupakan tugas yang harus dilakukan dan dikawal oleh semua pihak.

Berdasarkan pemahaman terkait pembangunan manusia yang telah penulis uraikan diatas, maka penting untuk kemudian menghadirkan sebuah analisis tentang pembangunan manusia berbasis gender. Dalam rangka mencapai tujuan dan target pembangunan yang memiliki nilai-nilai responsif gender, tentunya dibutuhkan data dan informasi yang akurat akan hal tersebut dalam kancah Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Berikut ini merupakan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sumber: Diolah dari (BPS Kabupaten Pemalang, BPS Provinsi Jawa Tengah dan KemenPAA RI Tahun 2021)

Dalam grafik diatas, diketahui bahwa IPG Indonesia yaitu 91.06, Provinsi Jawa Tengah 92.48 dan Kabupaten Pemalang yakni 86.49. Sedangkan IDG Indonesia yakni 75.57, Provinsi Jawa Tengah 71.64 dan Kabupaten Pemalang yaitu 81.27. Syahdan, penelitian ini secara spesifik hendak menyajikan analisis terkait pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan mengapa Pemalang dijadikan objek analisis karena pada tahun 2021, Kabupaten tersebut memiliki IPG dibawah rata-rata Regional Jawa Tengah, seperti yang terlihat dalam Gambar 2.



**Gambar 2.** IPG Kabupaten Pemalang. Sumber: (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

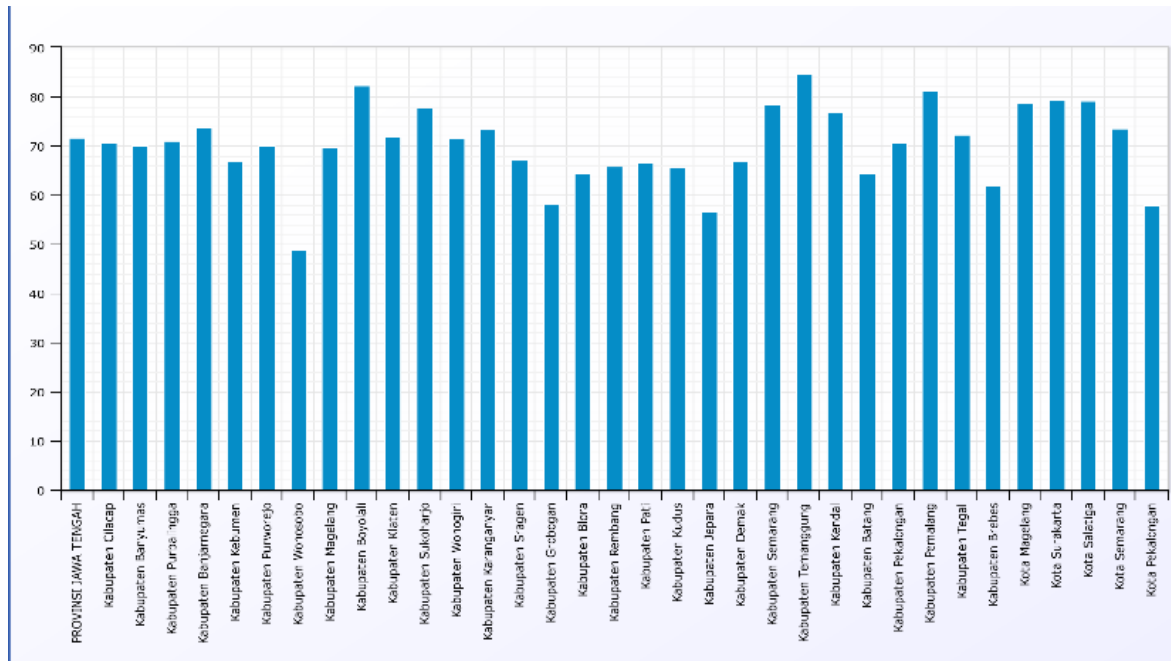
Berdasarkan grafik diatas, IPG Kabupaten Pemalang yaitu 86.49 dibawah IPG Jawa Tengah yaitu 92.48. Di sisi lain, IDG Kabupaten Pemalang yaitu 81.27 lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 71.64, tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berikut ini data IDG Kabupaten Pemalang tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Data IDG Kabupaten Pemalang tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020

Kabupaten / Kota	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender	
	2021	2020
Kabupaten Pemalang	81.27	80.95

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2021)

Berikut ini data IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Data IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Adapun dalam Indeks Pembangun Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang juga tidak memiliki peningkatan yang signifikan, yang mana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.29 bagi yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.96 bagi yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah tahun 2020 yaitu 75,87 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 69,94 bagi yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan IPM Jawa Tengah tahun 2021 yaitu 76,08 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 70,36 bagi yang berjenis kelamin perempuan. Berikut ini data IPM menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Pemalang, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data IPM menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Pemalang

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2021	2020	2021	2020
Pemalang	61.96	61.29	71.64	71.41

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2021)

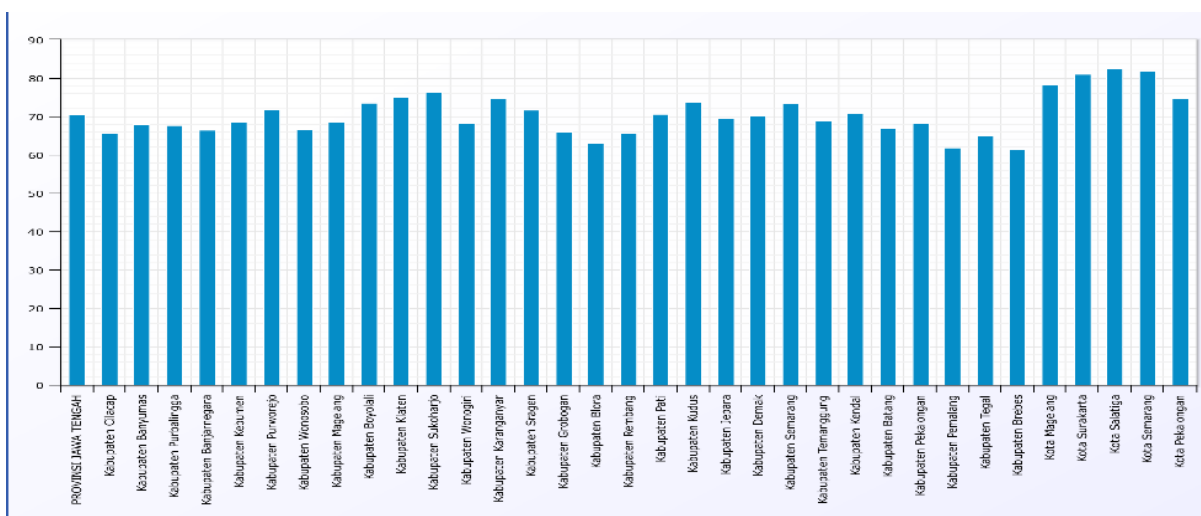
Berikut ini data IPM menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Data IPM menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2021	2020	2021	2020
Provinsi Jawa Tengah	70.36	69.94	76.08	75.87

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Berikut ini data IPM menurut jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Data IPM menurut jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah Sumber: (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Maka berangkat dari hal tersebut, menjadi perlu untuk kemudian disajikan analisis pembangunan manusia berbasis gender berdasarkan buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang diterbitkan oleh KemenPAA RI tahun 2021 dan hasil penelitian yang relevan, serta mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang untuk dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah dan praktisi sosial setempat dalam rangka memajukan pembangunan manusia berbasis gender.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dalam bagian pendahuluan diatas, mengenai pentingnya analisis pembangunan manusia berbasis gender dan eksplorasi potensi di Kabupaten Pemalang, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Pertama, menganalisis pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Pemalang tahun 2021 berdasarkan buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang diterbitkan oleh KemenPAA RI tahun 2021. Kedua, mengeksplorasi potensi yang dapat memajukan pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Pemalang tahun 2021. Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi

bagi pengembangan ilmu Gender dan Pembangunan. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam memajukan pembangunan manusia berbasis gender bagi Pemerintah setempat dan praktisi sosial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis data sekunder. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjudul "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pemalang sekaligus melihat trendnya di ranah regional dan nasional.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM dalam (*Badan Pusat Statistik, 2021*) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1) Umur panjang dan hidup sehat 2) Pengetahuan 3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (*Badan Pusat Statistik, 2021*).

Seperti yang telah disajikan dalam bagian pendahuluan, IPM Kabupaten Pemalang tidak memiliki peningkatan yang signifikan, yang mana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.29 bagi yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.96 bagi yang berjenis kelamin perempuan. Tidak signifikannya peningkatan IPM di Kabupaten Pemalang pada rentang 2020-2021 penting untuk menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah dan praktisi sosial setempat. Dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Pemalang, Pemerintah salah satunya dapat melalui pelaksanaan pendidikan responsive gender, dengan melakukan revitalisasi peran dewan pendidikan, yaitu mengoptimalkan fungsi dewan pendidikan sebagai *advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediating agency* (Mansur et al., 2022). Selain itu, pendidikan kultural yang melibatkan perempuan di ruang publik juga sangat membantu, terlebih apabila hal

tersebut kemudian dapat dijadikan program khusus Pemerintah setempat yang bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

## 2. Indeks Pembangunan Gender

IPG dalam (*Badan Pusat Statistik, 2021*) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Indeks (HDI)* pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Rumusan IPG yakni sebagai berikut:  $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$ .

IPG bermanfaat untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), 2) Pengetahuan (*knowledge*), dan 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Interpretasi yang digunakan dalam memahami data IPG yaitu sebagai berikut: “semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.” Berdasarkan grafik yang telah penulis sajikan dalam pendahuluan, IPG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 86.49 berada dibawah IPG Jawa Tengah yaitu 92.48. Hal ini kemudian penting menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah setempat untuk kemudian mampu berperan lebih aktif lagi dalam meningkatkan IPG yang cukup signifikan perbedaan jumlahnya dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IPG Kabupaten Pemalang, Pemerintah setempat dapat mengoptimalkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan pembangunan responsif gender, diantaranya dapat memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai *stakeholders* terutama di bidang bisnis sebagai upaya untuk bisa membantu memfasilitasi kegiatan terkait PUG secara finansial, meningkatkan intensitas bimbingan teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), merekrut dan memberikan pelatihan PUG bagi fasilitator dan auditor untuk melakukan kerja sama secara kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* dan



memaksimalkan koordinasi antar pelaksana dengan mengadakan rapat koordinasi rutin baik di awal, pertengahan, dan akhir tahun (Tazkia et al., 2022).

### 3. Indeks Pemberdayaan Gender

IDG dalam (D Astuti, 2021) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Di mana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam (*Badan Pusat Statistik, 2021*) berguna untuk melihat apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Berdasarkan data IDG Kabupaten Pemalang yang telah penulis sajikan dalam bagian pendahuluan, diketahui bahwa IDG Kabupaten Pemalang yaitu 81.27 yang mana data tersebut lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 71.64. Akan tetapi data tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Data IDG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 81.27 dan pada tahun 2020 yaitu 80.95.

Tidak adanya peningkatan yang signifikan pada IDG di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020-2021, merupakan suatu hal yang harus kemudian disikapi oleh Pemerintah secara proaktif. Kebijakan yang harus Pemerintah setempat yaitu melaksanakan pengarusutamaan gender, adapun strategi pengarusutamaan gender dapat terimplementasi secara optimal diantaranya yaitu: memperjelas regulasi yang mewajibkan pemberdayaan perempuan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, sistem dalam pemilu yang awalnya sistem keterpilihan calon diubah menjadi sistem proporsional tertutup dengan mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam dunia kerja, menghapus segala bentuk diskriminasi upah dalam pekerjaan dengan melakukan perumusan kebijakan yang responsif gender serta perlindungan hukum bagi angkatan kerja perempuan (Yuslin, 2021).

#### 4. Keterkaitan Kesetaraan Gender dan Pembangunan Manusia

##### a. Analisis Kuadran IPM dan IPG

Berdasarkan data IPM dan IPG Kabupaten Pemalang yang telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan, berikut ini disajikan kuadran yang memperlihatkan posisi Kabupaten Pemalang dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender diantara Kabupaten yang ada di Jawa Tengah, seperti terlihat pada Gambar 5.

<p><b>Kuadran I</b> Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Boyolali, Purworejo, Kudus, Klaten, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Sukoharjo, Kendal, Karanganyar, Kota Magelang, Salatiga.</p>	<p><b>Kuadran II</b> Sragen, Pati.</p>
<p><b>Kuadran III</b> Pemalang, Brebes, Banyumas, Cilacap, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Jepara, Demak,</p>	<p><b>Kuadran IV</b> Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten Pekalongan.</p>

**Gambar 4.** Data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2021), (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021) dan (Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender KemenPAA, 2021)

Keterangan: Kuadran I: IPM dan IPG diatas Regional; Kuadran II: IPM diatas Regional dan IPG dibawah Regional; Kuadran III: IPM dan IPG dibawah Regional; dan Kuadran IV: IPM dibawah Regional dan IPG diatas Regional. Berdasarkan data diatas, posisi Kabupaten Pemalang berada dalam Kuadran III bersama dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Pemerintah setempat yang berada dalam Kuadran III tersebut diatas, wajib untuk bersikap dan memberikan alokasi anggaran, perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terstruktur agar pada tahun yang akan datang posisi IPM dan IPG dapat ditingkatkan. Hal ini tentu perlu dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak.

##### b. Analisis Kuadran IPG dan IDG

Berdasarkan data IPG dan IDG Kabupaten Pemalang yang telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan, berikut ini disajikan kuadran yang memperlihatkan posisi Kabupaten Pemalang dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender diantara Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

<b>Kuadran I</b> Banjarnegara, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kendal, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Kota Semarang.	<b>Kuadran II</b> Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan.
<b>Kuadran III</b> Cilacap, Banyumas, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Batang, Brebes.	<b>Kuadran IV</b> Kabupaten Tegal, Pemalang.

**Gambar 6.** Data diolah dari (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2021), (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021) dan (Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender KemenPAA, 2021)

Keterangan: Kuadran I: IPG dan IDG diatas Regional; Kuadran II: IPG diatas Regional dan IDG dibawah Regional; Kuadran III: IPG dan IDG dibawah Regional; dan Kuadran IV: IPG dibawah Regional dan IDG diatas Regional. Berdasarkan data diatas, posisi Kabupaten Pemalang berada pada Kuadran IV bersama dengan Kabupaten Tegal. Adapun Pemerintah setempat yang daerahnya berada dalam Kuadran IV tersebut diatas, wajib untuk menunjukkan keberpihakan dan memberikan alokasi anggaran, perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang masif agar pada tahun yang akan datang posisi IPG dan IDG dapat ditingkatkan. Hal ini tentu perlu dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak.

## 5. Potensi dan Strategi Pembangunan Manusia Berbasis Gender

**Tabel 4.** Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan dan Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat di Desa, Tahun 2020

Kecamatan	Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat		
	Ada	Tidak Ada	Jumlah
Moga	1	9	10
Warungpring	1	5	6
Pulosari	2	10	12
Belik	3	9	12
Watukumpul	9	6	15
Bodeh	1	18	19
Bantarbolang	1	16	17
Randudongkal	1	17	18
Pemalang	6	14	20
Taman	9	12	21
Petarukan	6	14	20
Ampelgading	3	13	16
Comal	5	13	18
Ulujami	6	12	18
Kab. Pemalang	54	168	222

Salah satu strategi dalam upaya meningkatkan IPM, IPG, dan IDG yaitu mengoptimalkan akses terhadap pendidikan di luar wajib sekolah, melihat angka partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi dan dibandingkan dengan laki-laki, jumlah sekolah di desa, program-program sekolah mengajar, dapat memotivasi dan menginspirasi para perempuan desa untuk sekolah lebih tinggi (KemenPPA RI, 2021, hlm. 111). Selain upaya mengoptimalkan pendidikan di luar wajib sekolah melalui Taman Bacaan Masyarakat yang diarahkan untuk memotivasi dan menginspirasi para perempuan desa untuk sekolah lebih tinggi, penting juga untuk kemudian mengoptimalkan kesadaran kolektif masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan IPM, IPG, dan IDG.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Durkheim, bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat, yaitu pemahaman, norma dan kepercayaan bersama (Ritzer & Goodman, 2019, hlm. 92). Masyarakat primitif yang melekat pada masyarakat perdesaan sebagai mayoritas penduduk di Kabupaten Pemalang, seyogyanya dapat dipandang sebagai modalitas tersendiri yang sangat penting untuk dioptimalkan, terutama oleh sinergitas yang solid antara Pemerintah setempat dan praktisi sosial.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, IPM Kabupaten Pemalang tidak memiliki peningkatan yang signifikan, yang mana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.29 bagi yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Pemalang yaitu 71.41 bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan 61.96 bagi yang berjenis kelamin perempuan. Kedua, IPG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 86.49 berada dibawah IPG Jawa Tengah yakni 92.48 dan Nasional yaitu 91.06. ketiga, IDG Kabupaten Pemalang yaitu 81.27 yang mana data tersebut lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 71.64 dan Nasional yakni 75.57. Akan tetapi data tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Data IDG Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yaitu 81.27 dan pada tahun 2020 yaitu 80.95. Keempat, posisi Kabupaten Pemalang berada dalam Kuadran III (IPM dan IPG dibawah Regional) bersama dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Kelima, posisi Kabupaten Pemalang berada pada Kuadran IV (IPG dibawah Regional dan IDG diatas Regional) bersama dengan Kabupaten Tegal. Dan terakhir, potensi dan strategi dalam upaya meningkatkan IPM, IPG, dan IDG yaitu mengoptimalkan modalitas kesadaran kolektif dan Taman Bacaan Masyarakat. Berangkat dari poin-poin kesimpulan diatas,

terdapat saran bagi Pemerintah setempat dan praktisi sosial sebagai berikut: (1) Dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Pemalang, Pemerintah salah satunya dapat melalui pelaksanaan pendidikan responsive gender, dengan melakukan revitalisasi peran dewan pendidikan, yaitu mengoptimalkan fungsi dewan pendidikan sebagai *advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediating agency*. Selain itu, pendidikan kultural yang melibatkan perempuan di ruang publik juga sangat membantu, terlebih apabila hal tersebut kemudian dapat dijadikan program khusus Pemerintah setempat yang bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat; (2) Sebagai upaya untuk meningkatkan IPG Kabupaten Pemalang, Pemerintah setempat dapat mengoptimalkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan pembangunan responsif gender, diantaranya dapat memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai *stakeholders* terutama di bidang bisnis sebagai upaya untuk bisa membantu memfasilitasi kegiatan terkait PUG secara finansial, meningkatkan intensitas bimbingan teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), merekrut dan memberikan pelatihan PUG bagi fasilitator dan auditor untuk melakukan kerja sama secara kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* dan memaksimalkan koordinasi antar pelaksana dengan mengadakan rapat koordinasi rutin baik di awal, pertengahan, dan akhir tahun; (3) Kebijakan yang harus Pemerintah setempat yaitu melaksanakan pengarusutamaan gender, adapun strategi pengarusutamaan gender dapat terimplementasi secara optimal diantaranya yaitu: memperjelas regulasi yang mewajibkan pemberdayaan perempuan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, sistem dalam pemilu yang awalnya sistem keterpilihan calon diubah menjadi sistem proporsional tertutup dengan mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam dunia kerja, menghapus segala bentuk diskriminasi upah dalam pekerjaan dengan melakukan perumusan kebijakan yang responsif gender serta perlindungan hukum bagi angkatan kerja perempuan; dan (4) Masyarakat primitif yang melekat pada masyarakat perdesaan sebagai mayoritas penduduk di Kabupaten Pemalang, harus dipandang sebagai modalitas tersendiri yang sangat penting untuk dioptimalkan, terutama oleh sinergitas yang solid antara Pemerintah setempat dan praktisi sosial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alvarez, I., & Lovera, S. (2016). New Times for Women and Gender Issues in Biodiversity Conservation and Climate Justice. *Development*, 59(3-4), 263-265. <https://doi.org/10.1057/s41301-017-0111-z>
- Badan Pusat Statistik. (2021). <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2021). <https://pemalangkab.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). <https://jateng.bps.go.id/site/chartResultTab>

- Chen, P. (2021). *What is Gender Justice? | The Importance of Gender Justice*. Global Fund for Women. <https://www.globalfundforwomen.org/what-we-do/gender-justice/>
- D Astuti, D. (2021). *Kalimantan Tengah Predikat Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi Di Indonesia*. Kalimantan Tengah Predikat Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi Di Indonesia | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/kalimantan-tengah-predikat-indeks-pemberdayaan-gender-tertinggi-di-indonesia.html>
- Dankelman, I., & Naidu, K. (2020). Introduction: Gender, development, and the climate crisis. *Gender & Development*, 28(3), 447–457. <https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1843830>
- Hein, W., Steinfield, L., Ourahmoune, N., Coleman, C. A., Zayer, L. T., & Littlefield, J. (2016). Gender Justice and the Market: A Transformative Consumer Research Perspective. *Journal of Public Policy & Marketing*, 35(2), 223–236. <https://doi.org/10.1509/jppm.15.146>
- Mansur, A. H., Rahman, M., & Tang, M. (2022). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pendekatan Pendidikan Responsif Gender di Kabupaten Sumenep. *FIKROTUNA*, 15(01), Article 01. <https://doi.org/10.32806/jf.v15i01.5867>
- Pauzia, R. (2021). Pembangunan Berbasis Gender. *Musawa: Journal for Gender Studies*, Query date: 2022-10-03 21:19:23. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/msw/article/view/863>
- Prabhu, K. S., & Iyer, S. S. (2019). Gender and Human Development. In K. S. Prabhu & S. S. Iyer (Eds.), *Human Development in an Unequal World* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199490240.003.0008>
- Purwaningsih, E. (2021). *Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19248-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19248-Full_Text.pdf)
- Pusposari, D. (2020). Gender-Based Human Development in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i10.7405>
- Tazkia, A. T. A., Listyaningsih, & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>
- Weldon, S. L., & Htun, M. (2019). Response to Kara Ellerby’s review of *The Logics of Gender Justice: State Action on Women’s Rights Around the World*. *Perspectives on Politics*, 17(3), 825–825. <https://doi.org/10.1017/S1537592719002275>
- White, L. A. (2011). The Internationalization of Early Childhood Education and Care Issues: Framing Gender Justice and Child Well-Being: The Internalization Of Ecec Issues. *Governance*, 24(2), 285–309. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2011.01520.x>
- Wu, J. (2021). *The challenges of gender integration in development – The Loop*. <https://theloop.ecpr.eu/the-challenges-of-gender-integration-in-development/>
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, Query date: 2022-10-03 21:19:23. <http://jurnaljesi.com/index.php/jurnaljesi/article/view/32>